

SINTESA ISLAM-JAWA DALAM *SĔRAT WULANG DALĔM*
PAKUBUWANA IIThe Synthesis of Islam and Javanese Culture in *Sĕrat Wulang Dalĕm*
*Pakubuwana II*Ghis Nggar Dwiadmojo¹, Abimardha Kurniawan², Hesti Mulyani³,
Venny Indria Ekowati⁴, Eko Gunawan⁵, Yusi Nurcahya Dewi⁶^{1,3,4,5,6}Universitas Negeri Yogyakarta; ²Universitas Airlangga
ghisnggar@uny.ac.id; abimardha.kurniawan@fib.unair.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 10, 2025	Jul 5, 2025	Jul 17, 2025	Jul 22, 2025

Abstract

This study aims to examine the synthesis of Islamic and Javanese elements in the *Serat Wulang Dalem Pakubuwana II* (SWDPB II), as found in manuscript Ms. Orient Okt 1224 from the Staatsbibliothek Berlin collection. The research adopts a *new historicism* approach, which views literary works as inseparable from the historical, social, political, and economic contexts of their time. The data consist of textual excerpts from the manuscript, analyzed to identify manifestations of Islamic-Javanese cultural synthesis. The findings reveal that this synthesis is articulated through the use of terminology drawn from two distinct traditions that are harmoniously juxtaposed, such as Arabic and Javanese scripts, the figures of prophets and kings, and the symbolic pairing of the right and left eyes. Within the textual construction, these elements are interpreted as complementary rather than oppositional. This synthesis reflects an intellectual and spiritual response to the evolving ethical and social dynamics of the 19th century, particularly in the context of the interaction between Islam and Javanese culture within the royal court.

Keywords: Synthesis; Islam-Javanese; *Serat Wulang Dalem Pakubuwana II*; New Historicism; Court Literature

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sintesa Islam-Jawa dalam teks *Serat Wulang Dalem Pakubuwana II* (SWDPB II) yang termuat dalam naskah Ms. Orient Okt 1224 koleksi Staatsbibliothek Berlin. Kajian ini menggunakan pendekatan *new historicism* yang memandang karya sastra sebagai produk yang tak terpisahkan dari konteks sejarah, sosial, politik, dan ekonomi pada zamannya. Data penelitian berupa kutipan teks dari naskah tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi wujud sintesa budaya Islam dan Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sintesa Islam-Jawa diwujudkan melalui penggunaan istilah yang berasal dari dua kutub tradisi yang berbeda namun disandingkan secara harmonis, seperti aksara Arab dan aksara Jawa, figur nabi dan raja, serta simbol mata kanan dan mata kiri. Dalam konstruksi teks, elemen-elemen tersebut dipahami sebagai entitas yang saling melengkapi dan bukan bertentangan. Sintesa ini mencerminkan respons intelektual dan spiritual terhadap dinamika etika dan sosial yang berkembang pada abad ke-19, khususnya dalam konteks interaksi antara Islam dan budaya Jawa dalam lingkup keraton.

Kata Kunci: Sintesa; Islam-Jawa; *Serat Wulang Dalem Pakubuwana II*; New Historicism; Sastra Keraton

PENDAHULUAN

Jawa merupakan salah satu wilayah yang terpengaruh oleh ajaran Islam. Melalui karya-karya sastra Jawa abad ke-19 diketahui bagaimana respon kebudayaan Jawa terhadap kedatangan ajaran Islam ini. Melalui karya-karya sastra Jawa klasik, misalnya *Wedhatama*, *Wulang Reh*, *Tripama*, dan *Paniti Sastra*, diketahui bahwa Sastra Jawa memiliki panduan etika moral yang berasal dari Sastra Jawa Kuno. Misalnya tokoh dalam *Tripama* adalah Adipati Karna, Patih Suwanda, dan Kumbakarna. Tokoh-tokoh ini dapat ditemukan dalam teks *Ramayana* dan *Mahabharata* yang merupakan sastra kanon India.

Karya-karya sastra berbahasa Jawa, yang bermuatan agama Islam beraliran Ortodoks seperti *Serat Ambiya*, *Serat Yusup*, *Nabi Aparas*, dan *Menak Amir Hamza*, memberikan alternatif untuk etika moral Jawa yang berasal dari kitab suci Agama Islam melalui ajaran yang dicontohkan oleh para nabi. Ide tentang etika moral dalam teks-teks Jawa Islam Ortodoks terlalu fokus pada aspek syariat saja sehingga melupakan aspek hakikat yang menjadi inti atau ontologi dari sesuatu yang ada.

Selain kedua golongan di atas, terdapat satu lagi kelompok teks bermuatan etika Islam heterodoks. Dengan gaya yang vulgar teks-teks Jawa Islam Heterodoks, seperti *Suluk Gatholoco*, *Suluk Lonthang*, *Malang Sumirang*, *Suluk Sida Nglamong* dan *Suluk Wijil*, mengkritik ide tentang etika moral Jawa yang bersumber dari teks-teks Jawa Islam Ortodoks. Teks-teks ini lebih mengedepankan aspek batiniyah daripada aspek lahiriah.

Dengan kata lain terjadi kontestasi etika antara kelompok-kelompok teks ini. Jawa telah memiliki landasan etika moral yang mapan dalam teks-teks Jawa Klasik yang bersumber dari Jawa Kuno dan Sansekerta. Kedatangan Islam memberikan warna etika baru dalam kebudayaan Jawa. Teks-teks yang bermuatan teks Islam ortodoks ini menempatkan tokoh-tokoh nabi dalam Agama Islam sebagai sumber etika. Kedatangan teks-teks ini mendapat respon dari teks-teks yang muncul kemudian yaitu teks-teks heterodoks.

Serat Wulang Dalem Pakubuwana II (SWDPB II) muncul di tengah kontestasi etika moral untuk orang Jawa pada abad ke-19. Teks *SWDPB II* berpendapat bahwa konsepsi moral orang Jawa itu berasal dari Jawa dan Arab. Teks ini seolah mendamaikan pertikaian yang terjadi di antara kedua kutub kontestasi etika di Jawa abad ke-19.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan sintesa Islam-Jawa di dalam teks *SWDPB II*. Sintesa Islam-Jawa di dalam teks terdapat di dalam penggunaan dua terminologi yang berasal dari dua kutub yang berbeda secara bersama-sama, misalnya Jawa-Arab, nabi-raja, dan mata kanan-mata kiri.

METODE

Data penelitian ini berupa teks *SWDPB II* yang terdapat di dalam naskah dengan nomor kode Ms. Orient Okt 1224. Naskah ini merupakan koleksi Staatsbibliothek Berlin. Versi digital teks ini dapat diakses melalui tautan berikut ini https://digital.staatsbibliothekberlin.de/werkansicht?PPN=PPN826267386&PHYSID=P_HYS_0007&DMDID=DMDLOG_0001 pada bulan Juni 2021.

Kajian ini menggunakan perspektif *new historicism* yang mengasumsikan teks karya sastra merupakan bagian dari proses sejarah karena sastra tidak dapat diepaskan dari dinamika sosial, politik, serta ekonomi yang melingkupinya (Budianta, 2006: 2). Secara sederhana, cara pandang *new historicism* tidak hanya terbatas pada praktik membaca sejarah untuk memahami teks karya sastra, atau sebaliknya membaca karya sastra untuk memahami peristiwa sejarah. Pemahaman *new historicism* meliputi agensi serta kreatifitas manusia yang terlibat (maupun dilibatkan) dalam dinamika sejarah. Melalui *new historicism*, diketahui cara pandang yang kompleks dan komprehensif dalam suatu karya sastra. Hasilnya, sebuah karya sastra memiliki spektrum makna yang luar biasa kaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti teks-teks wulang lain, orientasi ajaran *SWDPB II* secara umum adalah membentuk individu yang baik. Penekanannya bukan pada kesalehan ritual, seperti salat, puasa, atau yang sejenisnya, namun lebih kepada moralitas dalam kehidupan sosial. Di dalam *SWDPB II* disebutkan bahwa besikap baik terhadap sesama juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Larangan berjudi, madat, hingga mengumbar syahwat, juga mendapat perhatian dalam *SWDPB II*. Orang yang melanggar larangan-larangan itu, maka dia tidak ubahnya setan. Derajatnya lebih hina dari najis dan anjing. Dia hanya akan mengotori semesta dan menyusahkan negara. Penyebab sikap buruk itu, menurut *SWDPB II*, adalah karena orang kurang menghayati pengetahuan agama dan tata krama.

SWDPB II punya pandangan menarik perihal ilmu. Ada dua kutub yang direkomendasikan. Kutub pertama berbasis pada ajaran Islam yang direpresentasikan dengan huruf Arab (*sastra Arab*), sedangkan kutub kedua berbasis pada ajaran moral Jawa yang direpresentasikan dengan aksara Jawa (*sastra Jawa*). Pembahasan kedua kutub itu ditempatkan pada bagian awal teks, seakan itulah isu sentral yang mula-mula harus dipahami. Konsekuensi moralnya bisa sangat luas. Salah satunya ada di dalam domain politik. Hal itu terkait dengan posisi raja sebagai pemimpin, yang sejajar dengan seorang nabi. Pembahasan pada bagian ini dimulai dari dua poin yang ditekankan di dalam *SWDPB II*. Pertama, kewajiban untuk menghayati ilmu yang bersumber dari kitab beraksara Arab dan Jawa. Kedua, kewajiban untuk taat kepada Allah, Rasul, dan Raja.

Aksara Arab dan aksara Jawa

Dualisme Arab dan Jawa dalam *SWDPB II* bermula dari ajaran tentang pentingnya pemahaman akan *sastra* 'aksara'. Dalam kasus ini, istilah *sastra* yang dimaksud tidak serta merta merujuk kepada karangan *belle-lettre* dalam pandangan Barat. Bahasa Jawa sekitar abad ke-19 kerap mendaulat pengertian *sastra* sebagai 'aksara' (Gericke dan Roorda, 1847: 340 sv *sastra*). Selain itu, keberaksaraan dalam hal ini berkaitan erat dengan ilmu. Ilmu itulah yang akan menjauhkan seseorang dari sawan, bahaya, dan sekian perangai buruk. Secara garis besar, perlambangan di dalam *SWDPB II* menghubungkan tulisan Arab dengan yang ruhaniah, sedangkan aksara Jawa dengan yang jasmaniah.

SWDPB II mengibaratkan dualisme keduanya seperti mata kanan dan mata kiri. Keduanya memiliki fungsi masing-masing. Huruf Arab adalah mata kanan yang berfungsi untuk melihat ke dalam jiwa sejati (*Suksma Jati*) sebagai unsur keilaihian dalam diri, sedangkan

aksara Jawa adalah mata kiri yang berfungsi untuk melihat alam jasmaniah. Posisi keduanya tidak dapat ditukar, karena hal itu terkait erat dengan genealogi Panembahan Senapati di dalam teks *babad*. Huruf Arab mewakili garis silsilah di sisi kanan (*silsilah panengen*), sedangkan aksara Jawa mewakili garis silsilah sisi kiri (*silsilah pangina*). Garis silsilah di sisi kanan menegaskan hubungan genealogis Panembahan Senapati dengan Nabi Muhammad beserta para nabi pendahulu dari jalur ayah. Sebaliknya, garis silsilah di sisi kiri mempertemukan pendiri dinasti Mataram-Islam itu dengan raja-raja Jawa masa pra-Islam termasuk dengan Arjuna putra Paṇḍu dari garis ibu (Padmasusastra, 1902: 1-114).

Dualisme huruf Arab dan aksara Jawa ibarat dualisme antara jiwa dan badan, roh dan tubuh. Dualisme terkait dua hal itu telah menjadi permasalahan filosofis yang sangat panjang. Menurut *SWDPB II* keduanya adalah kesatuan, bahkan cenderung deterministik, seperti perilaku yang baik adalah cerminan jiwa yang baik pula. Jadi, antara jiwa dan badan, salah satunya tidak boleh diabaikan. Tahu akan keduanya adalah sebuah kewajiban bagi manusia Jawa.

[...] Jawa Arab rong prakara,
ěndi lire denira adadi wajib,
sastra Arab punika,

ingkang nuduh kamulyaning urip,
kang ginělar dening Rasulollah,
kanggo wong sajagad kabeh,
sastra Jawa punika
witing tapěl ing tanah Jawi,
marga wataking tata,
krama kang rahayu
reh ning kinarya manungsa
dening suksma tinitah ing tanah Jawi,
mila kědah wruh Jawa

[...] huruf Arab adalah dua perkara,
seperti apa alasannya menjadi wajib?
Huruf Arab adalah

yang jadi petunjuk kemulyaan hidup,
yang diciptakan oleh Rasulallah
untuk manusia di seluruh dunia.
aksara Jawa tersebut,
muasal manusia di tanah Jawa,
jalan menuju watak tata-
krama yang baik.
alasan manusia diciptakan
oleh Tuhan diperintah tinggal di Jawa.
Karena itu harus tahu aksara Jawa.

Melalui kutipan di atas, secara tersirat *SWDPB II* mengajukan konsep identitas manusia Jawa yang ideal melalui kewajiban untuk memahami dua sistem aksara tersebut. Batas identitas yang tegas juga dijelaskan pada bait-bait selanjutnya. Apabila seseorang enggan mempelajari sistem tulisan Arab, maka dirinya pantas dibuang jagat ini, pantas menjadi Yahudi, dikungkung setan, serta akan menjadi orang bodoh. Sementara itu, kalau seseorang enggan mempelajari aksara Jawa maka dia patut diusir dari tanah Jawa. Dia tidak pantas menjejaki bumi Jawa. Orang seperti itu tidak mengerti adab dan tata krama yang telah diajarkan oleh para leluhur, termasuk raja. Jadi, selain sebagai penanda identitas manusia Jawa

yang ideal, kedua sistem aksara tersebut diposisikan oleh teks *SWDPB II* sebagai parameter sosio-spasial.

Sistem tulisan Arab menjadi penanda universal sedangkan aksara Jawa bersifat lokal. Walaupun Arab (baca: Islam) menjadi kiblat ruhaniah, tetapi adab Jawa tetap menjadi landasan praksis dalam kehidupan sosial. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Secara tersirat, dalam kasus ini, *SWDPB II* membawa agenda vernakularisasi Islam ke dalam konteks masyarakat Jawa. Adapun yang bertindak sebagai agen adalah masyarakat Jawa itu sendiri. Islam dan Jawa berada dalam satu tarikan nafas. Islam dan Jawa adalah kesatuan jiwa dan raga yang akhirnya membentuk kehidupan. Tentunya, kehidupan yang penuh keselamatan. Mengetahui huruf Arab dan aksara Jawa adalah pintu masuk menuju keselamatan (*babuning karahayun*), sebagaimana terungkap melalui bait berikut.

[...] angawruhi ing sastra Jawi, miwah ing sastra Arab, babuning karahayun, salah siji wong agèsang, aja suwung ing sastra Arab myang Jawi, sokur wignya sadaya.	[...] mengetahui aksara Jawa, serta huruf Arab, adalah pintu keselamatan. Salah satu (kewajiban) orang hidup, jangan akan huruf Arab dan Jawa, syukur-syukur jika tahu semuanya.
---	---

Terkait dengan kewajiban untuk memahami sistem aksara Jawa *SWDPB II* juga mengarahkan agar memahami wacana tempat aksara Jawa diaplikasikan, yakni *témbang*. Mengingat bentuk formal tersebut sangat populer digunakan untuk membingkai wacana, khususnya wacana tentang ajaran moral dan keagamaan. Ketika memasuki topik ini, *SWDPB II* memiliki relasi yang cukup akrab dengan teks *Sérat Sastra Gènding* (SSG), karya termasyur yang diatribusikan kepada sosok Sultan Agung (memerintah 1613-1645 Masehi), penguasa yang membawa Mataram mencapai puncak kegemilangan (de Graaf, 1990). Kedekatan tersebut tampak dari, (1) penyusunan pupuh dan (2) satu bait di dalam teks yang nyaris identik.

Nabi dan Raja

Bagian awal teks *SWDPB II* menyebutkan bahwa sejak semula karya ini meneladani apa yang tersurat di dalam kitab *Sipatul Wijra* (Ar. *sifat al-wazîr* ‘sifat-sifat menteri’), seraya memetik maknanya untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa (*binasaakén Jawi*). Tujuannya, memberi peringatan kepada anak-cucu agar mereka tidak terjebak ke dalam sawan kemalangan. *Sipatul Wijra*, uraian tentang kewajiban moral seorang menteri (Ar. *wazîr*) kepada raja yang dilayaninya itu, disebut pula dalam *Sérat Tajusalatin* (14.1-14.8), yang merupakan

hasil adaptasi pujangga Yasadipura I (1729-1803) atas karya berbahasa Melayu *Taj al-Salatīn* ‘Mahkota para Raja’ karya Bukhārī al-Jawhārī, seorang penulis dari Aceh awal abad ke-17. Kiranya, ajaran etika politik terkait sikap seorang menteri itu, bersumber dari postulat-postulat politik Abū al-Ḥasan al-Māwardī (972-1058), seorang pemikir teori politik bermazhab Syafī’i dari periode Abassiyah, di dalam kitab *Al-‘ahkām al-sultānīyah* ‘Tata Cara Pemerintahan’ (al-Mawardi, 1996: 23-31).

Adapun ajaran *Sipatul Wijra*, baik dalam *Sērat Tajusalatin* Jawa maupun *Taj al-Salatin* Melayu, terdiri atas lima butir sifat, antara lain: (1) paham dan awas akan tugasnya sejak awal hingga akhir, (2) patuh dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya, (3) tidak takut untuk melakukan sesuatu selama berlandas pada asas kebenaran, (4) tidak haus kekayaan dan jahil kepada kolega, dan (5) senantiasa menjaga rahasia negara dan raja (*Taj us-Salatin* 10; *Sērat Tajusalatin* 14.1-14.8, bdk. Dewahrani, 1991:85; Munfangati dkk, 1999: 67). Demikianlah parameter loyalitas seorang menteri. Walaupun jelas disebutkan pada awal teks, namun tidak ditemukan perincian semacam itu di dalam teks. Entah apa alasan yang mendasari penyematan *sipatul wijra* di awal teks. Akan tetapi, sikap loyal terhadap pemimpin (baca: raja) menjadi prioritas dalam teks ini. Kelima butir ajaran *sifat al-nazīr*-termasuk landasan moral yang melatarinya-kiranya telah terinternalisasi ke dalam *SWDPB II*. Atau, dengan kata lain, terdapat kemiripan ideologi di antara keduanya.

Salah satu penekanan teks *SWDPB II* adalah taat kepada Allah, Rasul, dan Pemimpin. Pandangan itu sesuai dengan satu ayat di dalam Quran yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan Ulil Amri di antara kamu.” (QS 4:59). Walaupun secara implisit *SWDPB II* juga menganjurkan untuk taat kepada orang tua, guru, sesepuh, maupun leluhur, namun ketiganya tetap yang utama. Dengan demikian, pada tataran permukaan, ajaran dalam *SGB* perihal ketaatan itu terhubung dengan kerangka keislaman yang universal. Akan tetapi, pada sisi yang lain, ajaran *SWDPB II* juga memberi konseptualisasi yang bersifat lokal dan tradisional terhadap dengan posisi Ulul Amri. Sistematisnya serupa dengan dualisme tulisan Arab dan Jawa yang telah diuraikan sebelumnya. Posisi tulisan Arab paralel dengan Rasul, sedangkan tulisan Jawa paralel dengan *Ulul Amri* yang di dalam teks kerap disebut sebagai *ratu* ‘raja’ (untuk selanjutnya akan disebut ‘raja’). Sebagai *ulul amri* ‘pemimpin’, raja memiliki kedudukan istimewa. Ia adalah sosok terpilih di antara semua makhluk. Ia mendapat mandat untuk memimpin semua makhluk itu. Pemilihan itu bahkan sudah terjadi sebelum alam semesta tercipta.

prandenne sayakti paḍa,
amung kari jējuluk ulul amri,
ing ruyat sampun kasēbut,
pēṭekaning manungsa,
sadurunge kang bumi langit maujud,
ulul amri wus pininta,
marentah samining urip.

Maka sesungguhnya sama
hanya (beda) sebutannya, Ulul Amri
dalam ruyat sudah disebutkan
kewajiban manusia
sebelum bumi dan langit terbentuk
Ulul Amri sudah diminta
memerintah sesama makhluk hidup.

Kekuasaan raja adalah takdir (predestinasi). Apabila diperhatikan verba pasif *pininta* ‘diminta’, tentu terbayangkan keberadaan agen yang melakukannya. Tentu, agen yang dimaksud adalah Allah. Jadi, hak kepemimpinannya diperoleh langsung dari Allah. Salah satu bagian teks mempertegas kedudukan raja sebagai “pengganti Tuhan” (*gēgēntining Suksma*) di dunia. Kedudukannya sejajar dengan seorang nabi.

basa nabi ratu gēgēntining Suksma, [...] Ibaratnya nabi raja pengganti Tuhan, [...]

Kata *gēgēnti* ‘pengganti’ (kd. *gēnti* ‘ganti’) dalam kutipan tersebut, sepadan dengan istilah *kalifah* dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, dalam sejarah kekuasaan Jawa, istilah *kalipatolah* (Ar. *kalīfatullāh*) ‘wakil Allāh’ disematkan sebagai gelar raja Jawa sejak Pangeran Mangkubumi memproklamirkan diri sebagai sultan (Hamengkubuwana I), dan selanjutnya gelar tersebut hanya digunakan oleh raja-raja Yogyakarta (Ricklefs, 1974: 78). Tentu, penyematan gelar itu didasari sikap Pangeran Mangkubumi untuk menegaskan sisi keislaman seorang raja Jawa, selain gelar *sultan* yang jelas merupakan kata serapan dari bahasa Arab.

Baik nabi maupun raja, dalam nalar kekuasaan Jawa pasca-islamisasi, sama-sama ditentukan oleh wahyu (Ar. *wahy* ‘perintah’). Secara teoritis, wahyu bisa diterima oleh siapapun, sepanjang dia adalah sosok terpilih, bukan hanya nabi. Ada kalanya status nabi dan raja berada di dalam satu sosok sekaligus. Sebagaimana Yusuf, sosok yang kisahnya sangat populer di Jawa. Selain dikenal sebagai nabi, Yusuf adalah juga raja yang memimpin negeri Mesir. Narasi-narasi atas pentingnya peranan wahyu dalam nalar kekuasaan Jawa dibangun melalui lakon-lakon wayang bertema suksesi. Wujud wahyu beragam dalam lakon wayang. Sebagian bentuk wahyu masih merupakan transformasi dari konsep inkarnasi (*avatara*) dalam tradisi Waiṣṇawa, atau mungkin berbentuk kekuatan (*śakti*) sebagaimana tradisi Śaktisme, termasuk dalam bentuk ajaran *aṣṭabratā* yang disampaikan Rāma kepada Bharatā. Apapun bentuknya, misinya tetap sama, yakni menegakkan hukum *dharma* agar umat manusia terhindar dari malapetaka (Darmoko 1988, 1992, 1994).

Wahyu bagi raja (baca: *ulul amri*) dalam perspektif *SWDPB II* dikonseptualisasikan sebagai roh primordial, yang mengemban perjanjian dengan Tuhan di Hari Alastu. Teks tidak menyediakan penjelasan teknis terkait bagaimana ketetapan itu turun menjelma ke dunia. Relasi temporal yang tersirat di dalam teks hanya terentang antara masa kini dan masa lalu, seperti hubungan akibat dan sebab. Jadi, apabila seseorang sekarang tengah menjadi raja, itu terjadi karena memang sudah ditakdirkan sejak di alam ruh. Menjadi raja adalah urusan takdir, *conditio sine qua non*. Takdir menjadi bagian inti dalam proses legitimasi kekuasaan raja.

Sejarah kekuasaan di Jawa dibangun melalui narasi-narasi pengkultusan raja. Kendati peralihan arus besar mewarnai perjalanannya, namun ada mentalitas yang tetap bertahan (dan dipertahankan). Konsep *kehalifatullah* dalam sejarah politik dan kekuasaan Jawa secara teoritis menggantikan konsep *devaraja*, namun praktik yang menempatkan raja sebagai pusat kosmos tidak serta-merta ditinggalkan (Behrend, 1989). Diksi dalam nomenklatur *abhiśekanāma* raja-raja Jawa, misalnya, memberi kesan bahwa raja adalah pusat alam semesta. Kata *paku* pada nama “Pakubuwana” dan “Pakualam”, memiliki hubungan asosiatif dengan *lingga* sebagai simbol Śiwa, yang merupakan salah satu karakteristik kultus *devaraja* di kawasan Asia Tenggara (Mabett, 1969; Kulke, 1978). Istilah “paku” memiliki asosiasi peran yang sejajar dengan Meru, gunung yang diusung dari Jambudwīpa untuk menstabilkan pulau Jawa yang guncang (*Tantu Pangġelaran*, 2.62-63). Demikianlah seorang raja.

Raja dengan segala tata pemerintahan yang diusung mampu mengendalikan keguncangan di masyarakat dan alam semesta. Mungkin masih banyak contoh lain terkait hal itu. Istilah *kehalifatullah* memang memiliki potensi untuk dimaknai dalam kerangka kultus *devaraja* yang telah menjadi laten. Akan tetapi, penyematan *ngabdulrahman* (Ar. *abd al-rahmān*) ‘hamba Yang Maha Pengasih’ tampaknya menjadi katalisator. Istilah tersebut menjadi pernyataan bahwa kedudukan raja tetaplah seorang hamba Tuhan. Batas-batas konseptual dimainkan. Sintesa-sintesa terbentuk. Muaranya, tidak lain adalah legitimasi kedudukan seorang raja dalam bidang politik, budaya, dan agama. Inilah implikasi lain dalam dualisme tulisan Arab dan Jawa yang dijabarkan pada bagian awal teks. Dengan demikian, alasan-alasan untuk bersikap loyal kepada raja kian menguat.

KESIMPULAN

Pembacaan karya-karya *wulang*, selain fokus pembacaan diarahkan pada butir-butir ajaran yang disampaikan, arah pembacaan juga perlu memperhatikan pula hal-hal tersirat di

baliknya. Kiranya, jika perhatian hanya diarahkan kepada unsur ajaran, maka lingkup pembacaan hanya sampai pada tataran permukaan. Model bahasa sastra *wulang* cenderung jelas dan lugas, tidak ambigu. Tentu hal tersebut bertujuan agar ajaran yang disampaikan tidak kabur, serta dapat diterima sepenuhnya oleh audiens. Sampai pada batas ini, cara pembacaan semacam itu boleh dianggap sah. Akan tetapi, pada tataran yang lebih jauh dan mendalam, konteks sosio-historis perlu dilibatkan karena suatu karya sastra *wulang* memiliki proyeksi. Mungkin terdapat sekian agenda yang disisipkan, baik ke dalam setiap butir ajarannya, maupun dalam keseluruhan strukturnya.

Teks *SWDPB II* digubah dalam suasana nostalgia untuk mengingat muasal serta kejayaan Mataram Islam satu atau dua abad sebelumnya. Memang, teks tidak secara eksplisit menyebutkan hal itu. Butir-butir ajaran *SWDPB II* yang memberi penekanan agar sidang pembacanya mengerti dan paham akan tulisan Arab dan Jawa, selain sebagai bentuk deklarasi atas identitas, juga menyiratkan masalah genealogi. Adapun yang tampak terlihat adalah genealogi pengetahuan Jawa yang mensintesis antara pengetahuan Islam yang berbasis literasi Arab (kanan) dan pengetahuan lokal Jawa dengan aksara Jawa sebagai basis literasi (kiri). Pemahaman lebih lanjut terhadap pola genealogi tersebut akan membawa kita kepada pertemuan *silsilah paněngěn* dan *silsilah pangjwa* dalam diri Paněmbahan Sěnapati, pendiri wangsa Mataram Islam. Selain itu, pada narasi selanjutnya, diuraikan pula masalah ajaran-ajaran terkait *těmbang* -bentuk formal yang hampir selalu digunakan untuk membingkai wacana dalam khasanah sastra Jawa (1.29-2.4). Isu tentang *těmbang* terkiat dengan ajaran dalam *Sastra Gěnding* diatribusikan kepada Sultan Agung. Isu tersebut ditempatkan setelah ajaran terkait literasi Arab dan Jawa. Dengan demikian, ada dua sosok penting dalam sejarah awal Mataram yang dijunjung oleh teks. Semangat milenarisme yang tersirat melalui teks *SWDPB II*, semakin mengukuhkan kesan nostalgia itu. Mataram yang terpecah-belah perlu ditata ulang, dan harus dikembalikan kepada model yang semula. Kedua sosok di atas adalah tauladan yang ideal.

Teks *SWDPB II* berpendapat bahwa konsepsi moral orang Jawa itu berasal dari Jawa dan Arab. Arab di tangan kanan dan Jawa di tangan kiri. Arab diibaratkan sebagai mata kanan, Jawa diibaratkan sebagai mata kiri. Begitulah perumpamaan kedua sumber etika moral ini dalam kontribusinya pada etika moral Jawa abad ke-19 menurut *SWDPB II*. Dengan demikian *SWDPB II* muncul sebagai penengah dengan pendamai kontestasi Jawa-Islam dalam ranah etika moral Jawa abad ke-19. Dalam pandangan *SWDPB II* tidak penting dari

mana sumber etika moral itu berasal, yang paling penting adalah etika moral secara pragmatis dapat mengatasi moral masyarakat Jawa yang mengalami kemerosotan dan degradasi akibat kolonialisasi dan banyaknya masyarakat Jawa yang kecanduan opium. Dengan demikian terjadi dialektika antarteks. Terjadi kontestasi ide tentang rumusan etika moral yang ideal bagi orang Jawa abad ke-19. Kontestasi ide ini dapat dilihat dari teks-teks yang beredar pada abad tersebut. Jawa sudah memiliki rumusan etika moral yang mapan yang berasal dunia Jawa Kuno yang diwariskan melalui teks-teks Jawa Klasik. Kedatangan Islam sebagai ajaran “baru” melalui teks-teks Jawa Islam Ortodoks mendapat respon yang beragam dan memperkaya etika moral Jawa.

Sintesa yang lahir dari dialektika antara theosofi Islam dan mistik Jawa adalah paham Kejawen, dari paham itu muncul dalam keberagaman masyarakat Jawa sebuah institusi baru, yaitu ke-batin an dengan budaya dan pranata tertentu yang diterapkan oleh komunitas kaum abangan yang didukung oleh budaya, tradisi dan ruh Keraton Jawa (Riyadi, 2013). Akulturasi Islam dan kebudayaan di Jawa terjadi secara dialogis-kultural, artinya terjadi proses dialog guna mencapai harmoni dengan kebudayaan setempat, hal ini menghasilkan wujud praktik keislaman yang substantif (Adam, et al., 2023). Teks yang digubah oleh para pujangga telah memberikan pemahaman yang kompleks mengenai kebudayaan masa lampau. Dalam hal ini Pujangga memainkan peran sentral sebagai pen-terjemah Tasawuf Islam dalam konteks kelokalan sehingga ter wujud penetrasi secara damai (Riyadi, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Y. F., Ramona, E., & Muhsin, I. (2023). Islam Melayu dan Islam Jawa: Studi komparatif akulturasi Islam dan kebudayaan dalam perspektif sejarah. *Muslim Heritage*, 8(1), 133–152. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i1.5723>
- al-Mawardi. (1996). *Ordinances of Government* (W. H. Wahba, Trans.). Garnet Publishing Ltd.
- Behrend, T. E. (1989). Kraton and cosmos in traditional Java. *Archipel*, 37(2), 173–187.
- Budianta, M. (2006). Budaya, sejarah, dan pasar: New historicism dalam perkembangan ilmu sastra. *Susastra*, 2(3), 1–19.
- Darmoko. (1988). *Wahyu dalam lakon wayang kulit purwa: Telaah intrinsik* [Skripsi tidak diterbitkan]. Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.
- Darmoko. (1992). *Wahyu Purbajati: Tinjauan atas wahyu*. Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.
- Darmoko. (1994). *Hakekat Wahyu Parunca Paridarma*. Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.
- Dewahrani, Y. R. (1991). *Serat Tajussalatin: Suntingan teks dan analisis perbandingan isi dengan Taj as-Salatin*. Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.

- Gericke, J. F. C., & Roorda, T. (1847). *Javaansch-Nederduitsch Woordenboek*. Johannes Müller.
- Graaf, H. J. de. (1990). *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik ekspansi Sultan Agung* (Seri Terjemahan Javanologi 4). Pustaka Utama Grafiti.
- Kulke, H. (1978). *The Devarāja Cult* (Data Paper No. 108). Southeast Asia Program, Department of Asian Studies, Cornell University.
- Mabbett, I. W. (1969). Devarāja. *Journal of Southeast Asian History*, 10(2), 202–223.
- Munfangati, T., & Sisilantini, E. (1999). *Serat Tajusalatin: Suatu kajian filsafat dan budaya*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Padmasusastra. (1902). *Sajarah Dalém Pangiwa Paněngěn winit saking Kanjěng Nabi Adam tuměka Kěraton Surakarta lan Ngayogyakarta Hadiningrat*. Van Dorp & Co.
- Ricklefs, M. C. (1974). *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749–1792: A History of the Division of Java*. Oxford University Press.
- Riyadi, M. I. (2013). Kontroversi theosofi Islam Jawa dalam manuskrip kapujanggan. *Al-Tabrir*, 13(1), 21–41